

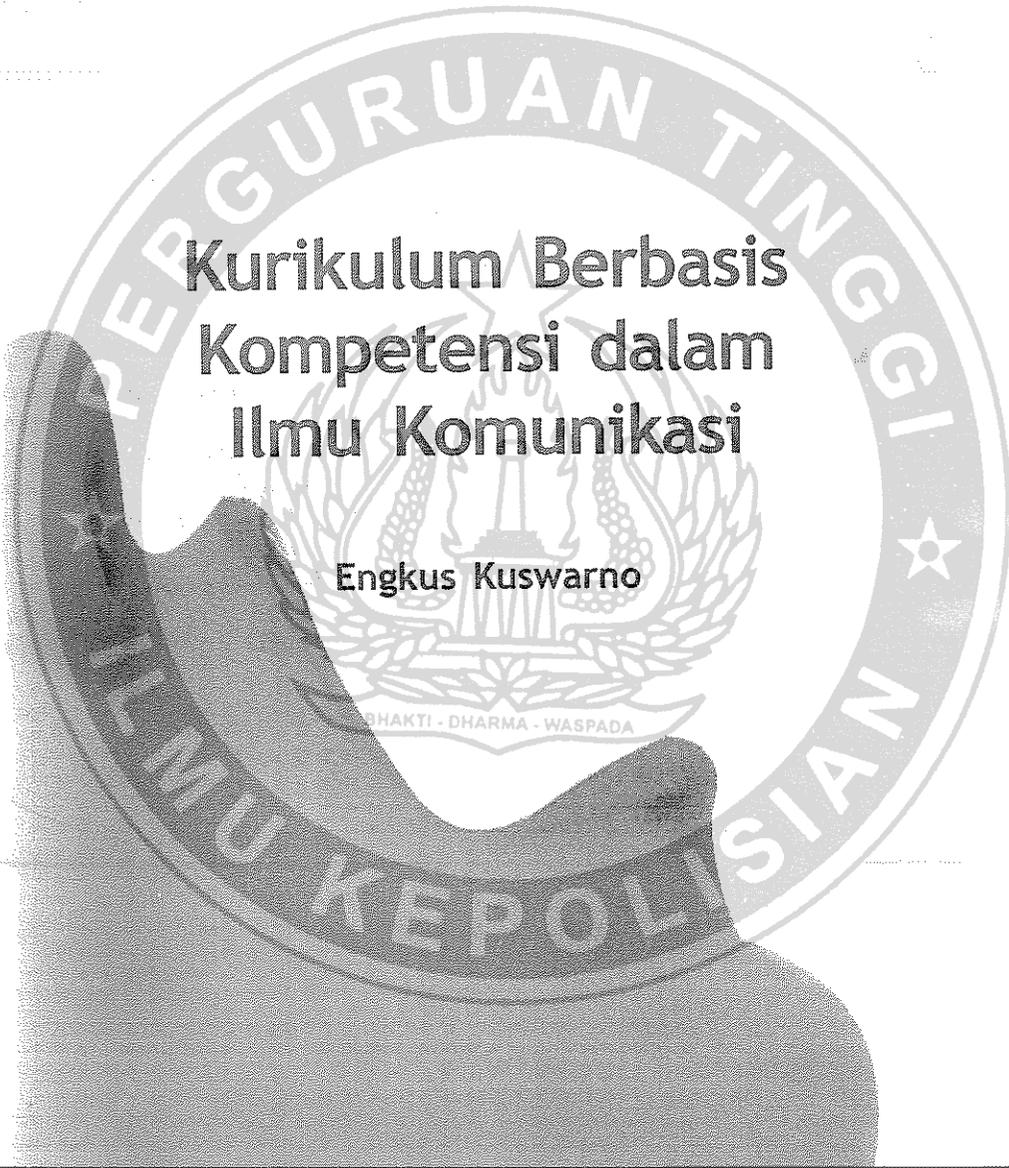
Indonesian Journal of  
Communication Studies

Volume 10  
No. 1  
2018

# Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam Ilmu Komunikasi

Engkus Kuswarno

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



# Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam Ilmu Komunikasi<sup>1</sup>

Engkus Kuswarno

❧ \* ❧

## ABSTRACT

Since Indonesia's independence, we have only known the name of curriculum based on the year of its implementation. At the beginning of Indonesia's independence, the curriculum was known as 1947 Curriculum, then it was changed into 1964 Curriculum. After four years, the government changed it into 1968 Curriculum. Seven years later, 1975 Curriculum came, then it was changed into 1984 Curriculum, it was changed again into 1994 Curriculum. However, this time, the name of revised Curriculum that has been discussed earlier by the National Education Department is not 2004 Curriculum, for instance, but Competency Based Curriculum (KBK). This Curriculum's name is a bit deviated from the former habits. This writing merely tries to focus a few things that can be used as a reference in accordance with the development of competency based curriculum of communication science.

*Key words:* curriculum, communication science, subjects.

❧ \* ❧

---

<sup>1</sup> Tulisan ini pernah disampaikan pada Semiloka Kurikulum Ilmu Komunikasi dan Pembentukan Gugus Dosen pada Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Untirta, 20 Desember 2006.

## Pendahuluan

Berdasarkan Kepmendiknas 232/U/2000, Pasal 7: Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi, terdiri atas Kurikulum inti dan Kurikulum institusional (ayat 1). Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional (ayat 2). Sedangkan kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan (ayat 4)

Untuk menetapkan kurikulum inti yang berlaku secara nasional Dirjen Dikti telah membuat Keputusan Dirjen Dikti No. 43 dan 44 tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan keputusan kelompok mata kuliah inti, yang mengikat. Di sisi lain, kurikulum institusional dipersiapkan dan diselenggarakan lebih fleksibel ketimbang kurikulum inti. Dalam mengembangkan kurikulum institusional yang berbasis kompetensi, perlu mempertimbangkan masukan dari para *stakeholders* (praktisi dan teoretisi termasuk pasar pengguna dan penyelenggara pendidikan ilmu komunikasi, baik PTN maupun PTS) dengan memperhatikan keragaman teoretis maupun pengalaman praktis secara institusional. Bagaimana kesiapan perguruan tinggi secara institusional dalam menentukan penyempurnaan kurikulum tersebut dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

### Keragaman Teoretis

Secara filosofis jangkauan komunikasi seluas perilaku manusia. Oleh karena itu komunikasi menjadi bagian penting pada kajian yang objek materialnya sama, seperti pendidikan, kesehatan, dan organisasi. Oleh karena itu, mengembangkan kurikulum ilmu komunikasi senantiasa memperhatikan objek bidang studi lainnya. Ilmu komunikasi merupakan "oase" sekaligus "residu" bidang-bidang ilmu lainnya.

Simposium Ilmu Komunikasi se dunia di Kanada tahun 2000 lalu menyimpulkan bahwa perkembangan terakhir terdapat 5 bidang penting untuk pengembangan Ilmu Komunikasi, yaitu:

- a. Pengembangan Teori & Model
  - b. Pengembangan Metode & Teknik Penelitian
  - c. Perkembangan Teknologi Komunikasi
  - d. Perkembangan Kebudayaan & Kemasyarakatan
  - e. Perkembangan Filsafat, Kebijakan dan Peraturan Perundangan.
- (Hamidjojo, 2000)

Dengan demikian, sudah selayaknya kurikulum ilmu komunikasi yang berlaku nasional maupun institusional mengacu kepada perkembangan ilmu komunikasi dunia, dengan memperhatikan landasan teori dan model-model komunikasi yang berkembang; perkembangan metodologi dan teknik penelitian; perkembangan teknologi komunikasi; kebudayaan dan kemasyarakatan; filsafat, kebijakan, peraturan perundangan.

Hal lain yang perlu dipikirkan adalah peninjauan ulang (reposisi) kurikulum dengan mempertimbangkan beberapa konsentrasi atau bidang kajian pada program studi ilmu komunikasi yang lebih fleksibel, mengikuti "minat pasar". Tiap periode tertentu bisa berubah, sesuai kebutuhan "pasar" (perkembangan lapangan kerja atau stakeholders), tetapi tetap memperhatikan paradigma ilmiah yang berkembang di dunia akademis.

Fleksibilitas muatan kurikulum menjadi bagian dasar penyusunan sebuah kurikulum. Penyelenggara pendidikan ilmu komunikasi harus berani menghapus mata kuliah yang tidak relevan dipertahankan atau berani menyelenggarakan perkuliahan yang diperlukan mengikuti perkembangan, misalnya perkembangan teknologi atau perubahan sosial. Misalnya di Fikom Unpad, sejak tahun 1996 menghapuskan mata kuliah Komunikasi Tradisional dan menggantikannya dengan Komunikasi Lintas Budaya. Bahkan menghapuskan Bidang Kajian Ilmu Penerangan dan menggantikannya dengan Manajemen Komunikasi.

## Keragaman Metode Penelitian

Perguruan Tinggi penyelenggara program studi ilmu komunikasi harus memberikan materi kurikulum yang memberi kesempatan kepada mahasiswa seluas-luasnya untuk memilih metode penelitian yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, untuk menyusun hasil karya akhir atau skripsi mereka. Dalam ilmu komunikasi sebenarnya dikenal beberapa perspektif komunikasi. Fisher (1986) menyebutkan perspektif mekanistik, psikologis, interaksional, pragmatik, dan dramatisme. Tucker *et al.* (1981), menyebutkan perspektif hukum peliput (*covering-law perspective*), perspektif aturan (*rules perspective*), dan perspektif sistem. Littlejohn (1996) mengemukakan teori (perspektif) struktural dan fungsional, kognitif dan behavioral, interaksionis, interpretif, dan teori kritis. Dalam konteks ini, seraya terus mempertahankan metode positivistik/kuantitatif (berlandaskan perspektif-perspektif: mekanistik, psikologis, hukum peliput, sistem/struktural fungsional, kognitif dan behavioral), maka metode penelitian kualitatif dalam ilmu komunikasi (berlandaskan perspektif-perspektif: interaksional, interaksionis, interpretif, dan kritis) perlu pula diajarkan, termasuk apa yang disebut analisis wacana dan analisis *framing*. Pengayaan analisis masalah ini penting, mengingat perkembangan kehidupan manusia yang semakin cepat dan semakin rumitnya realitas yang harus diamati.

Jensen (1991:1-2) mengemukakan, pertumbuhan paradigma kualitatif setidaknya dipicu oleh dua kondisi historis. *Pertama*, kondisi internal dalam komunitas ilmiah: Banyak pakar dan lembaga yang mempertanyakan daya eksplanatori pendekatan empiris konvensional dalam ilmu-ilmu sosial. Terdapat banyak konsensus bahwa banyak isu penelitian tidak cukup ditelaah melalui metode positivistik-kuantitatif. *Kedua*, kondisi eksternal di luar komunitas ilmiah: Perkembangan ilmu sedikit banyak berkaitan dengan perubahan dalam bidang sosioekonomi yang lebih luas, sehingga pendekatan kualitatif diperlukan untuk beradaptasi dengan bentuk realitas sosial yang baru, yang sering disebut masyarakat pascaindustri, era pascamodern, dan masyarakat informasi. Menurut Jensen, erosi pola-pola sosial tradisional dan perkembangan komunikasi massa sebagai sumber primer kohesi sosial di banyak kawasan dunia merupakan gejala abad ke-20 yang semakin cepat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini menuntut pencarian akan teori-teori dan metode-metode baru yang lebih kontekstual untuk memahami kompleksitas sosial dan budaya serta perubahannya.

Mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi secara konvensional melakukan penelitian secara deskriptif mengenai tanggapan khalayak atas suatu rubrik di media massa cetak atau suatu acara di media massa elektronik. Atau walaupun mereka melakukan penelitian eksplanatori, mereka biasanya meneliti efek dari media massa. Padahal, teori-teori baru tentang media massa menunjukkan bahwa, jangan acara hiburan atau iklan, bahkan berita saja tidak lagi dianggap netral atau objektif, melainkan suatu konstruksi yang bermuatan kepentingan pihak tertentu. Maka seorang mahasiswa misalnya dapat melakukan analisis *framing* mengenai "ideologi" dan keberpihakan di balik berita-berita seputar demonstrasi mahasiswa atau buruh di Indonesia, atau kasus hebohnya kedatangan Presiden Amerika Bush ke Bogor, Senin 20 November 2006.

Disadari atau tidak, penggunaan metode penelitian komunikasi di beberapa institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi mengalami perubahan paradigmatis, sejak era 60-an, 70-80 an dan 90-2000-an, sehingga kondisi ini memberi peluang pada pengembangan ilmu komunikasi itu sendiri (lihat Kuswarno, 2006).

### Penulisan Skripsi sebagai Pilihan

Salah satu materi dalam kurikulum ilmu komunikasi adalah Skripsi. Perlu dipertimbangkan penyusunan skripsi sebaiknya bersifat pilihan, terutama hanya dianjurkan bagi mereka yang akan melanjutkan studi ke program S2 (diperkirakan akan tetap banyak peminatnya). Sebagai gantinya, mahasiswa membuat suatu proyek akhir, berupa makalah setebal 20-40 halaman, atau tugas lain (misalnya bagi mahasiswa ilmu komunikasi, pembuatan laporan mendalam atas suatu kasus/peristiwa, misalnya tentang pembunuhan terhadap puluhan wanita yang

dilakukan seorang dukun, atau membuat paket berita dengan video tentang suatu lembaga pendidikan yang sukses, atau merancang suatu iklan TV).

Program S1 di Indonesia sebenarnya setara dengan program Sarjana Muda (*Bachelor*) di Amerika Serikat atau di Australia. Di kedua negara itu, seperti juga di Malaysia, tidak ada keharusan menulis skripsi bagi mahasiswa. Bahkan mahasiswa S2 (*Master*) pun tidak wajib menulis tesis, tetapi beban menulis tesis itu diganti dengan mengikuti dua atau tiga mata kuliah (setara dengan 6 SKS).

Bila pengajaran semua mata kuliah dilaksanakan optimal (kehadiran dosen dan mahasiswa yang penuh, setiap makalah diperiksa dikomentari dan dikembalikan kepada mahasiswa, dan praktik yang memadai di laboratorium), penyusunan skripsi menjadi tidak begitu penting. Di negara kita banyak skripsi yang ditulis mahasiswa sebagai pengulangan topik-topik sebelumnya. Hanya obyeknya yang berbeda, misalnya, dalam bidang jurnalistik rubrik surat kabar atau acara TV-nya, namun substansinya relatif sama. Padahal sebagian (besar) lulusan bidang ini nantinya akan bekerja sebagai praktisi, bukan sebagai peneliti. Kesan bahwa penulisan skripsi harus dipertahankan timbul karena tidak optimalnya pengajaran.

Bagi mahasiswa yang bermaksud terjun ke dunia kerja sesudah kuliah, latihan kerja (*job training*) yang memadai akan lebih berguna. Latihan kerja atau sistem magang sebaiknya ditambah dari satu hingga tiga bulan (praktik tiap hari) yang setara dengan dua atau tiga SKS hingga paling kurang enam bulan yang setara dengan paling sedikit enam SKS. Praktik kerja yang memadai akan memudahkan lulusan beradaptasi dengan lingkungan kerja.

## Keragaman Pengalaman Praktis

Pada sisi ini terdapat tiga hal yang dapat diperhatikan, yaitu masalah otonomi perguruan tinggi, kejelasan visi misi dan keluwesan sistem sks.

### 1. Otonomi PT

Hanya bila perguruan tinggi, fakultas atau jurusan diberi otonomi yang luas kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita dan menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul dalam masyarakat, yang punya integritas moral dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pasar. Salah satu wujud otonomi yang luas itu adalah kebebasan PT untuk menyusun kurikulumnya sendiri dengan mempertimbangkan pasar di wilayah di mana PT tersebut berada. Berdasarkan otonomi ini setiap fakultas, jurusan, atau program studi (ilmu komunikasi) sebenarnya dapat mengembangkan kajian khas yang dibutuhkan propinsi di mana lembaga pendidikan tinggi itu berada. Misalnya, UI mungkin istimewa dengan komunikasi massanya, sementara Unpad dengan manajemen komunikasinya, Unhas boleh jadi terkenal karena komunikasi pembangunannya, sementara Unisba mungkin bangga dengan jurnalistik cetaknya, atau Untirta populer dengan komunikasi bisnisnya (relevan dengan visi *entrepreneurial university*).

Ilmu komunikasi tidak hanya terdiri dari jurnalistik, *Public Relations*, manajemen komunikasi (dulu: penerangan), melainkan jauh lebih luas lagi. Setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan bidang-bidang lain yang lebih khusus lagi, misalnya: komunikasi lintasbudaya, komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, komunikasi satelit (telekomunikasi), penelitian komunikasi, ekonomi media, manajemen media, pelatihan dan konsultasi, teknologi komunikasi, perfilman, penulisan skenario, teknik animasi film dsb., yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, dibutuhkan kreativitas untuk mengembangkan bidang-bidang tersebut. Itu berarti bahwa desentralisasi pendidikan komunikasi mutlak diberlakukan di negara kita, karena staf akademik di perguruan tinggi yang bersangkutanlah yang mengetahui lapangan, bukan para birokrat di pusat yang duduk di belakang meja. Oleh karena itu menjadi sebuah tuntutan yang tidak bisa dielakkan lagi PTN menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara) pada tahun 2010, yang pada hakekatnya mengikuti pola penyelenggaraan seperti yang terjadi di PTS.

Berdasarkan otonomi tersebut, untuk menyongsong era global, jurusan atau program ilmu komunikasi dapat merancang seleksi khusus (tambahan) untuk merekrut mahasiswa, misalnya dengan melakukan wawancara bahasa Inggris, tes bahasa Inggris TOEFL atau IELTS, atau—ini yang lebih memungkinkan—mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris tertentu, sebagai syarat kelulusan mereka (misalnya lulus wawancara bahasa Inggris, nilai TOEFL minimal 500). Untuk tujuan itu, dapat dirancang mata kuliah bahasa Inggris lisan (*oral English* atau *conversation*), atau mensyaratkan nilai TOEFL tertentu, meskipun harus diambil di luar lembaga. Mahasiswa jurnalistik misalnya dapat juga disyaratkan untuk telah menulis sejumlah berita, feature, dan artikel (opini) yang dimuat dalam media umum sebagai syarat kelulusan mereka, atau setidaknya mengelola dan menerbitkan media intrakampus yang memuat hasil karya mereka (Namun demikian, jika ini diterapkan beresiko kekurangan mahasiswa yang memenuhi kualifikasi dan kampus akan lebih sepi dari sebelumnya).

Keterikatan kepada pemerintah pusat hanya akan menghambat pengembangan program pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Untuk memperoleh izin membuka program pendidikan baru saja, diperlukan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa satu-dua tahun, sementara para peminat bidang baru tersebut sangat besar dan bidang itu mempunyai prospek yang sangat baik. Jelas, seperti ditegaskan (mantan) Pembantu Rektor I ITB, Prof. Dr. Ir. Widiadnyana Merati, "Otonomi ini akan semakin meningkatkan profesionalisme pengelolaan PT di samping kemandirian dapat dipertahankan" (*Republika*, 15 Juni 1999).

## 2. Kejelasan Visi dan Misi Program Studi

Program studi ilmu komunikasi harus mempunyai visi dan misi yang jelas—bukan sekadar penghias bibir (*lip service*)—yang dapat dijabarkan melalui komposisi dan keragaman mata kuliahnya serta penyediaan fasilitas (khususnya laboratorium) pendidikan yang relevan. Pertanyaan kuncinya adalah: Bagaimanakah profil lulusan yang hendak dihasilkan program S1 kita: sebagai praktisi, atau teoretisi? Apa yang membedakan lulusan program S1 dengan lulusan program S2 atau S3, atau bahkan dengan program D3? Jawabannya tidak pernah jelas. Jawaban atas pertanyaan di atas sangat mempengaruhi kurikulum yang kita tawarkan. Bila produk yang akan dihasilkan pendidikan S1 juga sebagai praktisi, selain sebagai teoretisi, tentu saja harus banyak mata kuliah yang bersifat praktis dan keterampilan yang ditawarkan. Bila melihat program S1 di Fikom Unpad, misalnya, dengan melihat komposisi mata kuliah yang ada dalam kurikulumnya yang bersifat keterampilan tidak lebih dari 20 persen, dapat disimpulkan bahwa Fikom Unpad menghasilkan terutama teoretisi (konseptor).

Sementara pendidikan Diploma 3 lebih bersifat praktis, yang berbobot paling tidak 65 persen dari keseluruhan kurikulum, program S1 seyogianya menawarkan keahlian yang seimbang antara keahlian teoretis dan keahlian praktis. Idealnya, untuk saat ini setidaknya 30 persen dari keseluruhan kurikulum program S1 bersifat praktis (Akan tetapi dalam jangka-panjang rasio itu terus berubah dengan menambah mata kuliah praktis, hingga nantinya berbanding 50:50). Dalam pendidikan jurnalistik di *Columbia University*, New York, seperti disinggung Andreas Harsono (redaktur majalah *Pantau*) dalam semiloka yang diadakan Fikom Unisba 26 februari 2002, perbandingan aspek praktis dan teoretis itu adalah 80:20. Itu mungkin terlalu jauh buat kita (kalaupun mau diterapkan, itu lebih cocok buat program D3). Itu berarti bahwa sekarang ini jumlah mata kuliah praktis di beberapa perguruan tinggi, harus ditambah lagi dan jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) mata kuliah teoretis harus dikurangi agar beban SKS yang harus diambil dalam program S1 tetap.

Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas abad ke-21 secara berhasil, lulusan ilmu komunikasi harus mampu juga berbahasa Inggris (berbicara dan membaca) dengan menguasai teknologi komunikasi, khususnya menggunakan komputer. Ini berarti kedua keterampilan itu harus diajarkan kepada mahasiswa secara memadai, tidak hanya dua hingga empat SKS seperti yang mungkin berlaku sekarang ini. Solusi yang dapat diambil adalah: lembaga juga bisa mensyaratkan penguasaan bahasa Inggris dan program komputer tertentu kepada mahasiswa yang dapat diperoleh di tempat lain. Penguasaan bahasa Inggris khususnya perlu mendapatkan perhatian serius. Kalau para siswa di Pesantren Gontor Jawa Timur saja dituntut untuk mampu berbicara bahasa Inggris dalam keseharian mereka, logikanya para mahasiswa ilmu

komunikasi harus lebih mampu lagi dalam bidang itu, karena bahasa Inggris lebih relevan bagi mereka.

Kadang-kadang sulit juga membedakan program S1 dengan program S2. Menurut pengamatan, ada skripsi-skripsi mahasiswa S1 yang lebih baik dari tesis-tesis mahasiswa S2. Seharusnya, seperti dikemukakan Bambang Setiawan dalam seminar ISKI di Jakarta tahun 1997, program D3 hingga program S3 itu berjenjang dan ada keterkaitan antara program yang satu dengan program di atasnya dalam arti bahwa semakin tinggi tingkatannya, programnya semakin teoretis. Khusus untuk program S2, walaupun ada sifat praktisnya, bobotnya tidak lebih dari 20 persen, sementara program S3 murni bersifat teoretis/metodologis.

Agar terdapat keterpautan antara program S1 hingga program S3, seyogianya ketiga program itu ada di bawah fakultas atau jurusan yang sama. Bila terdapat mahasiswa S2 yang kurang berpengetahuan dalam mata kuliah tertentu, mereka dapat mengikuti kuliah tersebut yang ada dalam program S1.

### 3. *Keluwesan Sistem SKS*

Dewasa ini terlalu banyak jumlah SKS yang harus dipenuhi mahasiswa program S1 (antara 140 - 160 SKS). Bandingkan dengan beban studi S1 di *Department of Communication Studies, Northern Illinois University* (Amerika Serikat) dan di Jabatan Komunikasi Universiti Kebangsaan (Malaysia) yang masing-masing menetapkan hanya 120 SKS. Jelas beban studi yang dikenakan kepada mahasiswa S1 kita terlalu banyak. Beban ini sebenarnya dapat dikurangi dengan menghapus semua mata kuliah yang tidak relevan, baik yang ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional (kurikulum nasional) dan universitas, dan mengintegrasikan mata kuliah-mata kuliah yang tumpang tindih.

Di AS mahasiswa program S1 disebut mahasiswa penuh bila mengambil 15 SKS persemester (bandingkan dengan di Indonesia yang bisa mengambil hingga 24 SKS). Meskipun demikian, menurut pengamatan, beban belajar mahasiswa AS di luar ruang kuliah, meskipun tidak mengikat, kurang lebih adalah dua kali beban belajar di ruang kuliah, bila mahasiswa ingin berhasil dalam studi. Bila mahasiswa belajar 15 jam perminggu di kelas, maka mereka belajar 30 jam perminggu di rumah dan di perpustakaan. Tidak mengherankan bila mahasiswa AS jauh lebih sibuk belajar dan mengerjakan tugas dibandingkan dengan mahasiswa kita yang santai (padahal mereka mengambil 20 hingga 24 SKS).

Kurikulum yang sudah disusun harus dikaji ulang dan bila perlu direvisi, setidaknya lima tahun sekali, agar senantiasa mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mata kuliah tertentu tidak harus selalu ada setiap semester ganjil atau semester genap (apa lagi bila dosennya sedang tugas belajar di luar propinsi atau di luar negeri). Boleh juga mata kuliah tertentu diajarkan baik semester ganjil ataupun semester genap, atau bahkan diajarkan secara

insidental (misalnya dua atau tiga tahun sekali), bergantung kepada relevansinya, misalnya tentang "Bagaimana meliput peristiwa musibah gempa dan badai tsunami" Dewasa ini mahasiswa yang belajar ilmu komunikasi, seyogianya diberi pengetahuan sosial yang kuat, termasuk filsafat (ilmu), sosiologi, psikologi, antropologi, dan ilmu politik, ilmu ekonomi (meskipun semuanya sebagai pengantar) dan tentu yang terpenting adalah etika yang dapat menjadikan mereka punya integritas moral dan pribadi yang tangguh. Akan tetapi mata kuliah-mata kuliah yang kontemporer, seperti: komunikasi *internet (media on line)*, foto kreatif, teknik membaca berita *TV dan talkshow*, dan teknik periklanan modern, dapat ditambahkan sebagai mata kuliah sendiri atau paling tidak menjadi bahasan dalam suatu mata kuliah.

Sistem SKS seyogianya memungkinkan mahasiswa yang karena suatu sebab berhenti kuliah di tengah jalan (di-DO atau pindah) untuk diterima di perguruan tinggi lain (dalam program studi yang sama atau mirip), tanpa harus mengulangi studinya dari awal di perguruan tinggi yang baru. Dengan kata lain, jumlah SKS yang sudah diambil dapat ditransfer, atau dikurangi sedikit, bila programnya sama, meskipun tentu saja perguruan tinggi yang belakangan menetapkan persyaratan yang layak untuk menerima mahasiswa pindahan tersebut.

Semua kriteria yang baru dibahas tentu saja bukanlah panacea untuk memajukan program studi ilmu komunikasi yang berbasis kompetensi. Pada akhirnya kunci keberhasilan itu ditentukan oleh manusianya sebagai sumberdaya utama, khususnya para dosennya. Para dosen seyogianya terus belajar, meskipun mereka telah mencapai gelar akademik tertinggi. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dosen dengan mengambil *sabbatical leave* selama enam bulan, satu kali setiap lima tahun misalnya. Dalam rangka itu, dosen yang bersangkutan dapat menggunakan periode tersebut untuk menulis buku (atau setidaknya diktat kuliah), atau lebih baik lagi bekerja dalam bidang industri (meskipun sebagai relawan) untuk kemudian mensosialisasikan pengalaman yang diperolehnya di universitas tempat ia bekerja. Pada saat itulah para dosen dapat menggali seluas-luasnya untuk mengembangkan program studi ilmu komunikasi melalui kurikulum institusional dan masukan untuk kurikulum inti. Di samping itu, tentu saja fasilitas yang dibutuhkan haruslah memadai juga, seperti ruang editing, ruang video, laboratorium foto, laboratorium radio, laboratorium TV, ruang komputer (termasuk sistem internet), dan sistem informasi (*database*) berbasis komputer.

Jika kurikulum sudah dirancang dengan memperhatikan keragaman teoretis, keragaman metodologis dan keragaman pengalaman praktis, maka diharapkan ilmu komunikasi muncul sebagai bidang ilmu yang mapan dan otonom termasuk dalam pemberian gelar akademis.[]

**Daftar Rujukan**

- Fisher, B. Aubrey. *Teori-teori Komunikasi*. Penerj. Soejono Trimo. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Hamidjojo, Santoso S., *Reorientasi Kurikulum Ilmu Komunikasi*, makalah pada studium generale Pascasarjana Unpad, 2000.
- Jensen, Klaus Bruhn. "Introduction: The Qualitative Turn." Dalam Klaus Bruhn Jensen dan Nicholas W. Jankowski, ed. *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research*. London: Routledge, 1991, hlm. 1-11.
- Kuswarno, Engkus, *Perubahan Paradigma Penelitian Komunikasi di Unpad*, Orasi Ilmiah Dies Natalis Fikom Unpad ke 46, 18 September 2006
- Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication*. Edisi ke-5. Belmont: Wadsworth, 1996.
- Tucker, Raymond K., Richard L. Weaver II, dan Cynthia Berryman-Fink. *Research in Speech Communication*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1981.
- Sudarmadji, *Pengembangan Silabus KBK dalam Menentukan Mata Kuliah Kurikulum Inti*, Makalah Diskusi Panel Kurikulum di Untirta, 20 September 2005.
- Watzlawick, Paul., J.H. Beaven dan D.D. Jackson, 1967, *Pragmatics of Human Communication*, New York: W.W. Norton, Co.
- Kepemendiknas No. 232/U/2000
- Kepemendiknas No. 045/U/2002
- Keputusan Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006
- Keputusan Dirjen Dikti No. 44/DIKTI/Kep/2006

**Biodata Penulis**

Dr. H. Engkus Kuswarno, M.S. Lahir di Garut, 17 November 1963. Lulus S3 Manajemen Komunikasi di Unpad, 2004. Lulus S2 Komunikasi Pertanian di IPB Bogor, tahun 1993. Lulus S1 Ilmu Komunikasi di Fikom Unpad tahun 1987. Staf dosen di Fikom dan Pascasarjana Unpad sejak 1988. Pernah menjadi Ketua Jurusan Manajemen Komunikasi Unpad (1996-1999), Public Relations Unikom dan Poltek Pajajaran (1999-2001). Pernah juga menjadi tenaga detasering (detaser) Dikti pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang Banten (2005). Sekarang menjadi Kepala Pusat Pengkajian Komunikasi dan Pembangunan Fikom Unpad (sejak 2001), Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Unpad (sejak 2004) dan Asesor BAN PT (sejak 2000).

